

1.1.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Outcome

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Urusan Wajib						
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	<p>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) = 279,641</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m) = 2.226,668</p>	DPUPRP DPRKPLH	-
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi	DPUPRP	-

			<p>pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten</p>	<p>yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) = 73,337</p> $\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten}} \times 100 \%$ <p>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten = 160,173</p>		DPRKPLH	
		3	<p>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten</p>	<p>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten = 85.826</p> $\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten}}{\text{Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut}} \times 100 \%$ <p>Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut = 87.338</p>		<p>DPUPRP</p> <p>DPRKPLH</p>	-

		4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	<p>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah</p> <p>dan air limbahnya diolah IPALD = 45.374</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah rumah di Kabupaten = 78.561</p>		<p>DPUPRP</p> <p>DPRKPLH</p>	
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	<p>Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n -</p> $\frac{0}{0} \times 100\%$ <p>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2021</p>	0%	DPRKPLH	<p>Pelaksanaan penanganan rehab ataupun rumah korban bencana yang di bangun kembali/relokasi kewenangannya berada pada BPBD Berdasarkan SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/770-KUM/2021 Tanggal 15 Februari</p>

							<p>2021 tentang pembentukan tim teknis dan tim pendamping masyarakat kegiatan pelaksanaan bantuan stimulan rumah rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dimana DPRKPLH merupakan anggota Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Rusak Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 yang salah satu uraian tugasnya membantu PPK DSP BPBD dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana, memantau dan mengkaji pelaksanaan dan kemajuan perbaikan rumah sesuai termin atau tahapan pembayaran yang ditetapkan dalam petunjuk teknis
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	<p>Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni</p> $\frac{0}{0} \times 100\%$ <p>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah</p>	0%	DPRKPLH	

				Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan			
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	<p>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 86,61 ha</p> $\frac{86,61}{44,83} \times 100\%$ <p>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 44,83 ha</p>	193,19%	DPRKPLH	
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	<p>Jumlah unit rumah kumuh = 4.860</p> $\frac{4.860}{78.561} \times 100\%$ <p>Jumlah total unit rumah Kabupaten = 78.561</p>	6,19%	DPRKPLH	
		5	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 190	6,84%	DPRKPLH	

			PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{5.371}{78.561} \times 100\%$ <p>Jumlah unit rumah kabupaten = 78.561</p>			
3	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	<p>IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air</p> <p>IKD = Indeks Kualitas Udara</p> <p>ITH = Indeks Tutupan Hutan</p> <p>(30% x 50) + (30% x 90,68) + (40% x 39,65)</p>	<p>62,49</p> <p>68,70</p>	DPRKPLH1	<p>62,49 berdasarkan rumus (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%).</p> <p>Tapi Berdasarkan acuan Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5.318/PPKL/SET/REN. O/12/2020 Pada Tanggal 4 Desember tahun 2020 tentang metode perhitungan IKLH 2020- 2024 data dari Kementrian</p>

							<p>Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>mrnggunakan rumus</p> $(IKLH) = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ <p>Mrnjadi $(0,376 \times 58,42) + (0,405 \times 91,85) + (0,219 \times 43,54)$</p>
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	<p>Total Vol sampah yang dapat ditangani = 37.980</p> <p>37.980</p> <p>----- x 100%</p> <p>38.337</p> <p>Total vol timbunan sampah Kabupaten = 38.337</p>	99,07%	DPRKPLH	

		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten = 90 90 -----x 100% 102 Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 102	88.23	DPRKPLH	
--	--	---	--	--	-------	---------	--

Kepala Dinas Perkim dan LH
Kabupaten Tanah Laut,



ISMAIL FAHMI, S.E., M.T.
NIP. 19731128 199803 1 008

1.1 dCapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

1.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Output

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Null	DPRKPLH	Bidang Perkim akan melakukan kajian pada Tahun anggaran 2022. dan di rencanakan pada tahun berikutnya (TA. 2023) akan dilaksanakan rehabilitasi terhadap rumah yang terkena bencana alam tersebut.
				2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	532	DPRKPLH	SK Bupati Tanah Laut nomor 188-45/347-KUM/2021 tentang Penetapan Jumlah Rumah

								Penduduk dengan Kategori Rusak Berat, Rusak Sedang, Rusak Ringan Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.
				3	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Null	DPRKPLH	Pelaksanaan penanganan rehab ataupun rumah korban bencana yang di bangun kembali/relokasi kewenangannya berada pada BPBD Berdasarkan SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/770-KUM/2021 Tanggal 15 Februari 2021 tentang pembentukan tim teknis dan tim pendampinag masyarakat kegiatan pelaksanaan bantuan stimulan rumah rusak akibat bencana banjir dan

								tanah longsor di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dimana DPRKPLH merupakan anggota Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Rusak Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 yang salah satu uraian tugasnya membantu PPK DSP BPBD dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana, memantau dan mengkaji pelaksanaan dan kemajuan perbaikan rumah sesuai termin atau tahapan pembayaran yang
--	--	--	--	--	--	--	--	---

							ditetapkan dalam petunjuk teknis.
				4	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Null	DPRKPLH Pelaksanaan penanganan rehab ataupun rumah korban bencana yang di bangun kembali/relokasi kewenangannya berada pada BPBD Berdasarkan SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/770-KUM/2021 Tanggal 15 Februari 2021 tentang pembentukan tim teknis dan tim pendampingan masyarakat kegiatan pelaksanaan bantuan stimulan rumah rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dimana DPRKPLH merupakan anggota Tim Teknis Pelaksanaan

							<p>Bantuan Stimulan Rumah Rusak Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 yang salah satu uraian tugasnya membantu PPK DSP BPBD dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana, memantau dan mengkaji pelaksanaan dan kemajuan perbaikan rumah sesuai termin atau tahapan pembayaran yang ditetapkan dalam petunjuk teknis</p>
				5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai	Null	<p>DPRKPLH</p> <p>Pelaksanaan penanganan rehab ataupun rumah korban bencana yang di bangun</p>

					dengan rencana aksi			kembali/relokasi kewenangannya berada pada BPBD Berdasarkan SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/770- KUM/2021 Tanggal 15 Februari 2021 tentang pembentukan tim teknis dan tim pendampingan masyarakat kegiatan pelaksanaan bantuan stimulan rumah rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dimana DPRKPLH merupakan anggota Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Rusak Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 yang salah satu
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	---

								uraian tugasnya membantu PPK DSP BPBD dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana, memantau dan mengkaji pelaksanaan dan kemajuan perbaikan rumah sesuai termin atau tahapan pembayaran yang ditetapkan dalam petunjuk teknis
				6	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Null	DPRKPLH	Pelaksanaan penanganan rehab ataupun rumah korban bencana yang di bangun kembali/relokasi kewenangannya berada pada BPBD Berdasarkan SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/770-KUM/2021 Tanggal 15

								<p>Februari 2021</p> <p>tentang</p> <p>pembentukan tim teknis dan tim pendamping masyarakat kegiatan pelaksanaan bantuan stimulan rumah rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dimana DPRKPLH merupakan anggota Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Rusak Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 yang salah satu uraian tugasnya membantu PPK DSP BPBD dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir pelaksanaan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								perbaikan rumah korban bencana, memantau dan mengkaji pelaksanaan dan kemajuan perbaikan rumah sesuai termin atau tahapan pembayaran yang ditetapkan dalam petunjuk teknis
				7	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Null	DPRKPLH	Bidang Perkim belum melakukan kajian terhadap unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana, dikarenakan tidak disetujuinya program, kegiatan dan subkegiatan yang akan menghasilkan output IKK tersebut pada saat pengajuan anggaran . Penganggaran sudah pernah diajukan pada saat penyusunan

								<p>RANWAL untuk tahun 2021 namun tidak disetujui. Demikian pula dengan jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi serta jumlah luasan dan lokasi pencadangan lahan, akan terpenuhi apabila telah dilakukan kajian. Diharapkan pada usulan tahun berikutnya program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung terhadap SPM pada bidang Perkim dapat disetujui sehingga dapat diketahui Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana, Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi dan Jumlah, luasan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								dan lokasi pencadangan lahan.
		2	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Null	DPRKPLH	Bidang Perkim belum melaksanakan kegiatan terhadap IKK output tersebut dikarenakan belum adanya penganggaran. Penganggaran tidak teranggarkan dikarenakan belum dilaksanakannya kajian terhadap kegiatan tersebut. Pada tahun 2022 pemenuhan terhadap SPM dianggarkan hanya sebesar seratus juta untuk pengumpulan data rumah korban bencana setahun sebelumnya yang belum tertangani.
				2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau	Null	DPRKPLH	Bidang Perkim belum melaksanakan kegiatan terhadap IKK output tersebut dikarenakan belum

					bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM			adanya penganggaran. Penganggaran tidak teranggarkan dikarenakan belum dilaksanakannya kajian terhadap kegiatan tersebut. Pada tahun 2022 pemenuhan terhadap SPM dianggarkan hanya sebesar seratus juta untuk pengumpulan data rumah korban bencana setahun sebelumnya yang belum tertangani.
				3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Null	DPRKPLH	Bidang Perkim belum melaksanakan kegiatan terhadap IKK output tersebut dikarenakan belum adanya penganggaran. Penganggaran tidak teranggarkan dikarenakan belum dilaksanakannya kajian terhadap kegiatan tersebut. Pada tahun 2022

								<p>pemenuhan terhadap SPM dianggarkan hanya sebesar seratus juta untuk pengumpulan data rumah korban bencana setahun sebelumnya yang belum tertangani.</p>
				4	<p>Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p>	Null	DPRKPLH	<p>Bidang Perkim belum melaksanakan kegiatan terhadap IKK output tersebut dikarenakan belum adanya penganggaran. Penganggaran tidak teranggarkan dikarenakan belum dilaksanakannya kajian terhadap kegiatan tersebut. Pada tahun 2022 pemenuhan terhadap SPM dianggarkan hanya sebesar seratus juta untuk pengumpulan data rumah korban bencana setahun</p>

							sebelumnya yang belum tertangani.	
				5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Null	DPRKPLH	Bidang Perkim belum melaksanakan kegiatan terhadap IKK output tersebut dikarenakan belum adanya penganggaran. Penganggaran tidak teranggarkan dikarenakan belum dilaksanakannya kajian terhadap kegiatan tersebut. Pada tahun 2022 pemenuhan terhadap SPM dianggarkan hanya sebesar seratus juta untuk pengumpulan data rumah korban bencana setahun sebelumnya yang belum tertangani.
				6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Null	DPRKPLH	Bidang Perkim belum melaksanakan kegiatan terhadap IKK output tersebut dikarenakan belum

							adanya penganggaran. Penganggaran tidak teranggarkan dikarenakan belum dilaksanakannya kajian terhadap kegiatan tersebut. Pada tahun 2022 pemenuhan terhadap SPM dianggarkan hanya sebesar seratus juta untuk pengumpulan data rumah korban bencana setahun sebelumnya yang belum tertangani.	
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	86,61 Ha	DPRKPLH	SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/657-KUM/2021 Tanggal 15 Juli 2020
				2	Jumlah peningkatan unit kualitas RTLH	324	DPRKPLH	DPA 2021
				3	Jumlah luasan (ha) penanganan	7,11	DPRKPLH	Rekap data luasan (Ha) Penanganan

					infrastruktur kawasan kumuh			Infrastruktur Kawasan Kumuh
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni	4	Jumlah rumah di kab/kota	78,561	DPRKPLH	Dokumen RP3KP
				5	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	324	DPRKPLH	DPA 2021
				6	Jumlah rumah tidak layak huni	4616	DPRKPLH	Dokumen RP3KP
				7	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Null	DPRKPLH	Terhadap IKK Output tersebut belum dilakukan kajian. Kajian akan dilakukan pada tahun anggaran 2024.
				8	Rasio rumah (78.561) dan KK(117.185)	Null	DPRKPLH dan Capil	Terhadap IKK Output tersebut belum dilakukan kajian. Kajian akan dilakukan pada tahun anggaran 2024.
				9	Jumlah rumah pembangunan baru	Null	DPRKPLH	Terhadap IKK Output tersebut belum dilakukan kajian. Kajian akan dilakukan pada

								tahun anggaran 2024.
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	9	DPRKPLH	DPA 2021
				2	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Null	DPRKPLH	Pendataan terhadap IKK Output tersebut dilakukan tidak berdasarkan unit rumah namun berdasarkan panjang jalan, yaitu 2.004.845 m.
				3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/ off site)	Null	DPRKPLH	Pendataan terhadap IKK Output dilakukan tidak berdasarkan unit rumah namun berdasarkan panjang drainase terbangun, yaitu 275.847 m.
				4	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	123	DPRKPLH	Berdasarkan Dokumen RP3KP jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH sebesar 123 unit
				5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	5.058	DPRKPLH	Berdasarkan Dokumen RP3KP jumlah unit rumah

							yang terfasilitasi akses PJU sebesar 5.058 unit
				6	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	36	DPRKPLH Rekapitulasi Bidang Perkim
				7	Jumlah pengembang yang teregistrasi	36	DPRKPLH Rekapitulasi Bidang Perkim
				8	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	36	DPRKPLH Rekapitulasi Bidang Perkim
2	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	1	Hasil perhitungan provinsi terhadap a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Lahan (IKL) d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	a. 58,42 b. 91,85 c. 43,54 d. 68,70	DPRKPLH Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	38.337	DPRKPLH Jakstrada persampahan Kabupaten Tanah Lauut per tahun
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang	3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	9 Izin PPLH dan 0 PPU LH	DPRKPLH PUU LH tidak ada disebabkan terbitnya peraturan baru yaitu Undang-Undang RI Nomor

			diterbitkan Pemerintah Kab/Kota	oleh Daerah		pemerintah daerah kabupaten/kota			<p>11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan turunan lainnya, yang mana aturan tersebut merubah aturan-aturan teknis tentang perizinan dan masih dalam masa transisi penerapannya. Selain itu aturan tersebut juga telah merubah kewenangan kerja terkait perijinan Kabupaten/Kota sehingga sejak Februari 2021 tidak ada lagi Izin PPLH yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota hanya</p>
--	--	--	---------------------------------------	----------------	--	-------------------------------------	--	--	---

								mengeluarkan Persetujuan Teknis.
				4	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	2 : 102	DPRKPLH	2 Orang Pengawas LH Daerah melaksanakan pengawasan terhadap 102 Pelaku usaha (AMDAL Dan UKL)
				5	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota vb	Belum dilaksanakan penetapan MHA	DPRKPLH	-.Tahapan kegiatan baru melaksanakan pendataan inventarisasi MHA -.Telah di laksanakan koordinasi kegiatan melalui DPRKPLH Tala Kec Kintap, dengan Aparat Desa Riam Adungan dengan DLH Propensi berkenaan pendataan MHA -. Telah di laksanakan kunjungan lapang

								ke Madya Dayak, Riam Adungan untuk pelaksanaan perencanaan imventarisasi MHA
				6	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	-	DPRKPLH	belum bisa dilaksanakan pada tahun 2021 dan tahun 2022 karena keterbatasan SDM dan keterbatasan anggaran namun kegiatan tersebut akan kembali diusulkan pada rancangan awal RKPD tahun anggaran 2023
				7	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	-	DPRKPLH	belum bisa dilaksanakan pada tahun 2021 dan tahun 2022 karena keterbatasan SDM dan keterbatasan anggaran namun kegiatan tersebut akan kembali diusulkan pada rancangan awal RKPD tahun anggaran 2023

				8	<p>Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani</p>	<p>Yang Melanggar =90</p> <p>Yang di Awasi= 102</p> <p>Presentase $\frac{90}{102} \times 100\% = 88,23$</p>	DPRKPLH	<p>Jumlah penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar tidak izin lingkungan</p>
--	--	--	--	---	---	--	---------	--

Kepala Dinas Perkim dan LH
 Kabupaten Tanah Laut,

ISMAIL FAHMI, S.E., M.T.
 NIP. 19731128 199803 1 008

